

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Legawa Eko Putra
legawa01@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of human resource competence, internal control system, and government accounting standard on financial statement quality. The independent variables were human resource competence, internal control system, and government accounting standard. Moreover, the dependent variable was financial statement quality. The population was the head of the Finance section and the staff of the accounting section who worked in 34 OPD of East Java province. In line with that, there were 68 questionnaires had been distributed to and returned by the respondents. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on the criteria given. The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution). The result hypothesis test showed that the internal control system as well as the government accounting standard had a significantly positive effect on financial statement quality. However, human resource competence did not affect financial statement quality.

Keywords: government accounting standard, financial statement quality

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Variabel dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah sebagai variabel bebas, serta Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bagian keuangan dan Staf fungsi akuntansi yang berada di 34 OPD Dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angket (kuesioner) yang disebar kepada responden di 34 OPD Dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Total 68 kuesioner yang disebar dan semua telah mengisi. Teknik pemilihan sampel yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya memiliki suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi kedalam bentuk laporan keuangan (Syarifudin *et. al*, 2020). Laporan Keuangan sektor publik menjadi instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang berkualitas harus dapat disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu tanda bahwa laporan keuangan dianggap sudah berkualitas adalah ketika

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami berdasarkan (Evi, *et. al*, 2020). Saat ini terdapat fenomena dalam perkembangan sektor publik di Indonesia yaitu menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik lembaga pusat maupun daerah (Evi, *et. al*, 2020).

Kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sudah dilakukan Jawa Timur, yang dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut. Di antaranya, penguatan komitmen pengelolaan keuangan yang profesional dari seluruh pimpinan unit kerja. Kemudian, pembinaan secara berkesinambungan dari inspektorat dan PPKD terhadap seluruh SKPD. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di antaranya memperbaiki manajemen kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan. Kedua, meningkatkan kualitas laporan kinerja sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, asistensi penyusunan laporan kinerja kepada seluruh perangkat daerah, sehingga dapat memantau dan memacu peningkatan kinerja melalui pendalaman model serta bentuk format laporan dan data yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penyajian laporan. Kualitas laporan keuangan dapat mengalami peningkatan dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern. Hasil penelitian Lilis *et. al* (2016) membuktikan bahwa faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak terdapat dalam penelitian adalah pemahaman akuntansi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem pengendalian intern, pengalaman kerja, dan beberapa faktor eksternal yang dianggap bisa mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Pertama Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan adanya kompetensi aparatur. Dalam mengelola keuangan daerah, SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. SDM yang kompeten tersebut akan lebih mudah memahami logika akuntansi dengan baik. Pembuatan laporan keuangan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang membuat laporan keuangan tersebut memahami akuntansi sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Kedua Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan bahwa proses pengelolaan anggaran dapat efektif dan efisien, terutama dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang andal. Dengan sistem pengendalian internal yang baik maka akan dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan daerah yang mempunyai kualitas yang baik atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Ketiga Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dengan menyatakan bahwa entitas pelapor mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran, dalam paragraph-paragraph selanjutnya menjelaskan tentang pentingnya pengungkapan semua informasi keuangan yang dibutuhkan bagi pengguna. Hal tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam membaca laporan. Ketentuan dalam penerapan SAP akan menjadi pedoman dalam penyusunan

laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan Indra (2016) menjelaskan bahwa tiga faktor yaitu kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat diindikasikan bahwa semakin besar kompetensi seorang pegawai dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk faktor standar akuntansi pemerintah juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian internal untuk tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian Ningrum dan Sundari (2022) yang menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya semakin meningkat.

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?, sedangkan tujuan dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut: Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Menurut Kurniawan (2016) penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Laporan keuangan sektor publik yang ideal adalah yang dapat memenuhi syarat kualitatif Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) Dapat dipahami

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan suatu entitas pelaporan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Yendrawati (2013) menyatakan bahwa pengertian kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Sudiarti (2020) mengungkapkan jika Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Wibowo (2018) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut: (1) Keyakinan dan nilai-nilai, (2) Ketrampilan. Pengalaman, (3) Keahlian, (4) Karakteristik Kepribadian, (5) Motivasi. (6) Isu Emosional, dan (7) Kemampuan Intelektual.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016) Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran - ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Krismiaji (2015) pengendalian internal adalah Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. SAP dapat digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Abusyadza, 2007). Menurut PP 71 Tahun 2010, standar laporan keuangan merupakan "persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia"

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 adalah "prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Sebagai implikasi ditetapkannya SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mempunyai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Wiwik dan Utami (2020) menyatakan bahwa kompetensi merupakan sifat individu berhubungan dengan *skill*, *knowledge*, dan *ability* yang dimiliki perorangan ketika menjalankan pekerjaannya. Kompetensi dapat menghemat waktu seseorang dalam menyusun laporan keuangan sehingga *up to date* dan hasil akurat. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh entitas akan semakin bernilai jika secara tepat waktu laporan keuangan tersedia.

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Mulyadi (2016) Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Indra (2016) Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya. Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu.

H2: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian Zulkarnain dan Ningrum (2020) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah serta implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kualitas proses pengolahan informasi yang didukung oleh kualitas sistem informasi membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik. Penerapan standar akuntansi pemerintahan meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Minarwati *et. al.*, (2021) menemukan bahwa standar akuntansi merupakan panduan dan dasar-dasar dalam mengatur pelaksanaan akuntansi ketika menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi merupakan hal yang dibutuhkan dalam mencapai konsistensi pelaporan keuangan.

H3: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, menganalisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat korelasional (*Correlational Research*). Menurut Arikunto (2019) penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada.

Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017), populasi didefinisikan sebagai area generalisasi yang peneliti selidiki, terdiri dari objek atau subjek dengan sifat dan karakteristik tertentu, yang darinya dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini akan menguji pengaruh beberapa faktor tertentu terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi jawa timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara sengaja sesuai dengan persyaratan atau kriteria sampel yang diperlukan Arikunto (2019). Dalam penelitian ini penulis mengolah data kuisoner dalam bentuk data yang terdiri dari 14 pernyataan untuk variabel standar akuntansi pemerintah (X1), 15 pernyataan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia (X2), 23 pernyataan untuk variabel sistem pengendalian internal (X3), 10 pernyataan untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Kuisoner yang disebarakan ini diberikan kepada 34 Organisasi Pemerintahan Daerah dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah diwakili 2 orang perwakilan. Sebagai responden pada sampel penelitian dengan menggunakan skala item berbentuk tabel ceklis. Pengiriman kuesioner dilakukan pada tanggal 15 Maret 2023. Setelah 3 minggu kuesioner yang kembali hanya sebanyak 68 *google form* kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data dan hasil penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh berasal dari kuisoner. Kuisoner yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden dengan menggunakan *google form* secara di *email*. Dalam penelitian ini responden yang ditunjukkan kepada individu yang mengetahui dan paham terhadap pelaporan pemerintah daerah yakni kepala sub bagian keuangan dan sub bagian fungsi akuntansi.

Variabel dan Devinisi Operasional variabel

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Yang terdapat 4 indikator yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dipahami, (4) Dapat dibandingkan. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan sebagai berikut: (a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS), (c) Angka 3 = Kurang Setuju (KS), (d) Angka 4= Setuju (S), (e) Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Kompetensi aparatur pemerintah daerah adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya Kemampuan seseorang atau individu, dalam satu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya. Yang terdapat 5 indikator yaitu: (1) Banyak Pelatihan, (2) Lama Penggunaan, (3) Kualitas Pelatihan yang diikuti, (4) Landasan kepribadian; penguasaan ilmu dan ketrampilan; kemampuan berkarya; (5) sikap dan prilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlianberdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan sebagai berikut: (a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS), (c) Angka 3 = Kurang Setuju (KS), (d) Angka 4= Setuju (S), (e) Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Sistem Pengendalian Intern (X2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Yang terdapat 5 indikator yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi Komunikasi, (5) Pemantauan. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan sebagai berikut: (a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS), (c) Angka 3 = Kurang Setuju (KS), (d) Angka 4= Setuju (S), (e) Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Standart Akuntansi Pemerintah (X3)

Menurut PP 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Yang terdapat 3 indikator yaitu: (1) Pencatatan, (2) Penggolongan, (3) Pelaporan. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan sebagai berikut: (a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS), (c) Angka 3 = Kurang Setuju (KS), (d) Angka 4= Setuju (S), (e) Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017) menjelaskan analisis data adalah aktivitas mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, tabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, penyajian data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah serta perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak antara 111 00' bujur timur sampai 804 8' lintang selatan dan antara 114 04' sampai 70 12' bujur timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan pemerintahan dengan bantuan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya. Setiap OPD sebagai pengguna anggaran menjalankan tugasnya dengan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai dengan bidang tugas OPD yang bersangkutan. Setiap OPD bertugas membantu pemerintah Provinsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Karakteristik Demografi

Penelitian ini menggunakan data primer, jumlah responden yang diambil pada penelitian ini ada 68 responden yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan, dan 1 orang staf fungsi akuntansi keuangan pada 34 OPD di Provinsi Jawa Timur. Karakteristik responden disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Deksripsi Responden

	Karakteristik	Jumlah	Presentase
I	Usia		
	Dibawah 35 tahun	21	28.95%
	35-45 tahun	25	38.15%
	46-55 tahun	21	28.95%
	Diatas 55 tahun	1	3.95%
	Total	68	100%
II	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	28	35.50%
	Perempuan	40	64.50%
	Total	68	100%
III	Jabatan		
	Kepala Sub Bagian Keuangan	34	50%
	Fungsi Akuntansi	34	50%
	Total	68	100%
V	Masa Bekerja		
	< 5 tahun	4	6.25%
	6-10 tahun	17	23.19%
	11-15 tahun	27	41.31%
	16-20 tahun	19	29.25%
	Total	68	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat diketahui responden berusia diatas 55 tahun sebanyak 1 orang dengan presentase 3.95%. Selanjutnya diikuti usia 46-55 tahun sebanyak 21 orang dengan presentase 28,95%. Serta usia 35-45 dan dibawah 25 tahun masing-masing 38,15% dan 21 orang dengan presentase 28,95%. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 orang dengan presentase 64,50%, sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang dengan presentase 35,50%. Dapat dilihat bahwa dua pihak organisasi telah terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Dengan responden aparatur sipil negara sesuai posisi masing-masing sebanyak 34 orang dengan persentase 50% untuk kepala sub bagian keuangan dan 50% untuk fungsi akuntansi. Mayoritas responden memiliki masa kerja lebih dari 16-20 tahun sebanyak 19 orang dengan presentase 29,25% Selanjutnya, diikuti masa kerja 11-15 tahun sebanyak 27 orang dengan presentasi 41.31% dan masa kerja kurang dari 5 tahun masing-masing sebanyak 4 orang dengan presentase 6.25%, serta masa kerja 6-10 tahun sebanyak 17 orang dengan presentase 23.19%.

Statistik Deskriptif Data

Statistik Deskriptif merupakan pengujian untuk mengetahui gambaran data yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dengan aplikasi nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Berikut ini tersaji hasil uji statistik deskriptif dari variabel standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP	68	33.00	45.00	38.4706	2.24918
SDM	68	31.00	60.00	45.4853	6.52777
SPI	68	57.00	110.00	91.6912	10.90291
KLK	68	37.00	50.00	42.0735	3.66230
Valid N (listwise)	68				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Variabel standar akuntansi pemerintah diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 14 dan 68 responden yang dihasilkan. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai rata-rata sebesar 45.485 untuk minimum 33.00 dan maksimum 45.00. sedangkan untuk nilai standar deviasi pada variabel standar akuntansi pemerintah sebesar 2.249. Artinya dengan kondisi memilih tanggapan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti melalui kuensioner rata - rata memilih *Setuju* atas jawaban yang diberikan, maka dapat diartikan bahwa standar akuntansi pemerintah pada sampel dan populasi yang diambil peneliti ini sudah cukup baik.

Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 15 dan 68 responden yang dihasilkan. Variabel standar akuntansi pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 45.485 untuk minimum 31.00 dan maksimum 60.00. sedangkan untuk nilai standar deviasi pada variabel standar akuntansi pemerintah sebesar 6.527. Artinya dengan kondisi memilih tanggapan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti melalui kuensioner yang tersebar rata-rata kompetensi sumber daya manusia memilih *Setuju* atas jawaban yang diberikan, maka dapat diartikan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada sampel dan populasi yang diambil peneliti ini sudah cukup baik.

Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 23 dan 68 responden yang dihasilkan. Variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 91.691 untuk minimum 57.00 dan maksimum 110.00. Sedangkan untuk nilai standar deviasi pada variabel standar akuntansi pemerintah sebesar 10.902. Artinya dengan kondisi memilih tanggapan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti melalui kuesioner rata - rata memilih *Setuju* atas jawaban yang diberikan, maka dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah pada sampel dan populasi yang diambil peneliti ini sudah cukup baik.

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 10 dan 68 responden yang dihasilkan. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 42.073 untuk minimum 37.00 dan maksimum 50.00. sedangkan untuk nilai standar deviasi pada variabel standar akuntansi pemerintah sebesar 3.662. Artinya dengan kondisi memilih tanggapan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti melalui kuesioner, maka dapat diartikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada sampel dan populasi yang diambil peneliti ini sudah cukup baik.

Statistik Inferensial (Regresi Linier Berganda)

Uji Validitas

Uji validitas data untuk membandingkan antara nilai r hitung dan r tabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Untuk menguji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel degree of freedom (df)= $n-2$, dalam hal ini jumlah sampel yaitu 68-2 maka $df=66$ sedangkan r hitung dengan melihat tampilan output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item-Total Correlation*, kemudian nilai *Corrected Item-Total Correlation* dibandingkan dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator valid. Berikut ini adalah hasil uji validitas.

Tabel 3
Uji Validasi

Nama Variabel	Correlation	Keterangan
SAP 1	0,642	Valid
SAP 2	0,639	Valid
SAP 3	0,602	Valid
SAP 4	0,612	Valid
SAP 5	0,665	Valid
SAP 6	0,586	Valid
SAP 7	0,709	Valid
SAP 8	0,701	Valid
SAP 9	0,707	Valid
SAP 10	0,577	Valid
SDM 1	0, 289	Valid
SDM 2	0, 300	Valid
SDM 3	0, 463	Valid
SDM 4	0, 632	Valid
SDM 5	0,526	Valid
SDM 6	0,775	Valid
SDM 7	0,776	Valid
SDM 8	0,902	Valid
SDM 9	0,729	Valid
SDM 10	0,782	Valid
SDM 11	0,757	Valid
SDM 12	0,771	Valid
SDM 13	0,830	Valid
SDM 14	0,649	Valid
SDM 15	0,605	Valid
SPI 1	0, 725	Valid
SPI 2	0, 838	Valid
SPI 3	0, 826	Valid
SPI 4	0, 814	Valid
SPI 5	0,874	Valid
SPI 6	0,875	Valid
SPI 7	0,854	Valid
SPI 8	0,908	Valid
SPI 9	0,883	Valid
SPI 10	0,401	Valid
SPI 11	0,865	Valid
SPI 12	0,841	Valid
SPI 13	0,916	Valid
SPI 14	0,890	Valid
SPI 15	0,811	Valid
SPI 16	0,849	Valid
SPI 17	0,908	Valid
SPI 18	0,574	Valid
SPI 19	0,879	Valid
SPI 20	0,388	Valid
SPI 21	0,418	Valid
SPI 22	0,834	Valid
SPI 23	0,641	Valid
KLK 1	0, 723	Valid
KLK 2	0,768	Valid
KLK 3	0, 893	Valid
KLK 4	0, 885	Valid
KLK 5	0, 850	Valid
KLK 6	0, 848	Valid
KLK 7	0, 441	Valid
KLK 8	0,742	Valid
KLK 9	0,720	Valid
KLK 10	0,871	Valid

Sumber: Data Primer Diolah. 2023

Berdasarkan tabel diatas terdapat jawaban dari setiap variabel dinyatakan valid. Tetapi ada beberapa indikator dari standar akuntansi pemerintah yang tidak valid yaitu Indikator 11, 12, 13, dan 14 karena memiliki nilai p-value > 0.05, sehingga harus dieliminasi untuk keempat indikator tersebut, sehingga hasilnya yang awalnya ada 14 indikator berubah 10 indikator.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban dari setiap variabel yang mana apabila variabel yang digunakan berbeda maka tetap sama dan konsisten jawabannya. Pengujian reliabilitas pada ini juga menggunakan alat bantu statistic yaitu *Cornbach's Alpha*. Suatu kuesioner akan dikatakan handal atau reliable jika hasil dari pengujian menghasilkan angka $\geq 0,6$ sedangkan jika angka yang dihasilkan $\leq 0,6$ maka alat ukur tersebut dikatakan tidak handal atau reliable. Hasil dari pengujian reliabilitas menggunakan *Cornbach's Alpha* pada SPSS Statistics disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Setiap Variabel

Nama Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	0,838	Reliable
Kompetensi Sumber daya Manusia (X ₂)	0,899	Reliable
Sisitem Pengendalian Internal (X ₃)	0,969	Reliable
Kualitas LAporan Keuangan (Y)	0,915	Reliable

Sumber: Data Primer Diolah. 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel yang ada dinyatakan *reliable*, karena nilai *cronbach alpha* dari variabel memiliki nilai diatas > 0,06.

Uji Normalitas

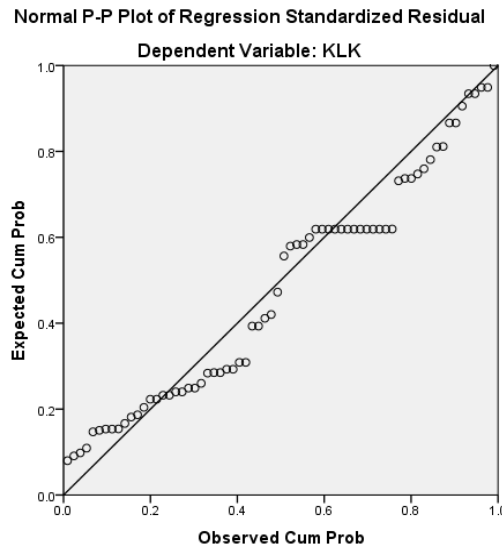
Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu (residual) berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*, yang mana apabila nilai *asympt. Sig* atau tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 dinyatakan berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya bila signifikansi kurang dari 0,05 dinyatakan tidak normal. Hasil dari Uji Normalitas yaitu sebagai berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.63365977
Most Extreme Differences	Absolute	.143
	Positive	.143
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		1.178
Asymp. Sig. (2-tailed)		.125
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data Primer Diolah. 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwasannya dalam uji normalitas pada residual regresi menghasilkan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,125 sehingga nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari > 0,05. Oleh karena itu data peneliti yang telah memenuhi asumsi dan dinyatakan berdistribusi normal sehingga data dapat digunakan untuk penelitian. Dalam uji ini juga dapat dilihat dengan histogram sebagai berikut:



Gambar 1
Histogram Uji Normalitas
 Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Data pada grafik histogram dan p-plot test di atas terdistribusi dengan normal dikarenakan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Uji ini dapat dideteksi dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi, yang ketentuan nilai VIFnya tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Hasil dari Uji Multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolineritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
SAP	.935	1.070
SDM	.478	2.092
SPI	.458	2.184

a. Dependent Variable: KLK
 Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai toleransi masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Oleh karena itu penelitian ini dinyatakan lulus uji multikolinearitas sehingga data dapat digunakan untuk penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian asumsi residual yang menggunakan varians tidak konstan yang mana dapat dideteksi dengan metode chart *scatterplot*. Menurut Ghozali (2018:38). Uji heteroskedastisitas dengan uji glejser bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dengan ketentuan yaitu: (1) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai hitung lebih kecil dari tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. (2) Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai hitung lebih besar dari tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

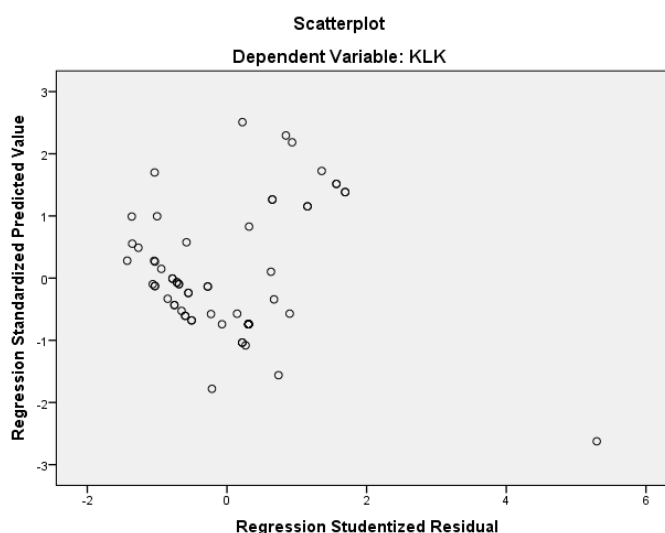
Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.297	4.516		-.509	.613
1 SAP	.111	.117	.119	.949	.346
SDM	.102	.056	.319	1.817	.074
SPI	-.048	.034	-.250	-1.393	.169

a. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah (SAP), sumber daya manusia (SDM), dan sistem pengendalian internal (SPI) memiliki nilai probabilitas signifiansi di atas 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya pola *scatterplot* yang mendukung bukti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sebagai berikut:



Gambar 2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot
Sumber: Data Primer Diolah, 2023

**Hasil Uji Kelayakan Model
Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)**

Pengujian Koefisien Determinasi digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang telah ditetapkan dalam koefisiensi determinasi ini dapat dilihat melalui hasil dari angka koefisien determinasi (R²) dari hasil output SPSS. Nilai koefisien determinasi R² mulai dari angka nol sampai dengan satu. Ketentuan penilaian pengujian ini yaitu apabila nilai R² = 0 maka tidak ada sama sekali variabel independen yang berpengaruh pada variabel dependen, dan apabila R² = 1 maka dapat dikatakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat baik. Berikut ini tersaji hasil output SPSS terkait uji determinasi dari data penelitian.

**Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.695 ^a	.483	.459	2.69468

a. Predictors: (Constant), SPI, SAP, SDM

b. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 9 diketahui koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,483. Besarnya angka koefisiensi determinasi (R Square) adalah 0,695. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel independen (X₁) dan (X₂) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) sebesar 48,3%. Sedangkan sisanya (100% - 48,3% = 51,7%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Nazaruddin dan Basuki, 2015). untuk menguji apakah variabel independen secara keseluruhan mampu mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variable independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dan dinyatakan layak. Begitu juga sebaliknya bilamana nilai signifikansi > 0,05 maka variable independen tidak mempengaruhi variabel dependen dan dinyatakan tidak layak.

**Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	433.909	3	144.636	19.919	.000 ^b
	Residual	464.723	64	7.261		
	Total	898.632	67			

a. Dependent Variable: KLK

b. Predictors: (Constant), SPI, SAP, SDM

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap dependen (Y) atau berarti signifikan karena kurang

dari 0,05. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memakai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Uji t menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis ditolak, dan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen signifikan dengan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji t dari output SPSS dari data penelitian.

Tabel 10
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients			
			Beta			
	(Constant)	7.294	5.852		1.246	.217
1	SAP	.433	.151	.266	2.861	.006
	SDM	.076	.073	.135	1.039	.303
	SPI	.160	.045	.476	3.585	.001

a. Dependent Variable: KLK
Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Maka dari hasil Uji t tersebut maka dapat dijelaskan perumusan hipotesis sebagai berikut:

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Nilai signifikan kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,303 lebih besar dari 0,05 maka H_1 dalam penelitian ini ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal

Nilai signifikan sistem pengendalian internal sebesar 0,001 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Standar Akuntansi Pemerintah

Nilai signifikansi standar akuntansi pemerintah sebesar 0,006 kurang dari 0,05 maka H_3 dalam penelitian ini diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Kompetensi Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 11 diatas, diperoleh nilai koefisien variabel penerapan sistem pengendalian internal sebesar 0,076, dan tingkat signifikansi sebesar 0,303 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa pegawai yang tidak berkompeten

atau berkompeten tidak mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan, karena laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan standart yang dibuat oleh pemerintah dan menggunakan software yang sama. Pegawai yang mengelola laporan keuangan sebelum melakukan pengelolaan laporan keuangan diberikan sebuah pelatihan mengenai cara mengelola laporan keuangan sesuai standart yang berlaku. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pegawai yang berkompeten ataupun tidak berkompeten dianggap memiliki kompetensi sumber daya manusia yang sama dalam mengelola laporan keuangan, sehingga tidak mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan. Sub bagian akuntansi atau keuangan SKPD memiliki kompetensi sumber daya yang kurang memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ucik *et. al* (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dan hasil penelitian Nur dan Rahmawati (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 11 diatas, diperoleh nilai koefisien variabel penerapan sistem pengendalian internal sebesar 0,160, dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 kurang dari $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka H_2 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang meningkat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa pengendalian intern yang dilaksanakan oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berjalan secara optimal dan dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ucik *et. al* (2020) menyatakan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan tabel 11 diatas, diperoleh nilai koefisien variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,433 dan tingkat signifikansi sebesar 0,006 kurang dari $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka H_3 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah yang meningkat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sudah diterapkan dengan baik oleh Dinas pada SKPD Jatim, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah pun akan semakin baik. Karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Pemaparan tersebut didukung oleh Abdul (2012) yang menyatakan, untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi tadi. Jadi jelas, bahwa untuk memperoleh

kualitas laporan keuangan daerah sesuai SAP harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah., (2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) Standar Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Maka saran untuk Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu Peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Sasaran dari pengembangan kualitas SDM adalah untuk meningkatkan kinerja. Kualitas SDM yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas dan meningkatkan evaluasi secara rutin dan pengawasan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah serta dukungan regulasi sangat diperlukan untuk kepastian hukum. Teknologi informasi pun harus mendukung agar laporan keuangan bisa berkualitas, cepat, tepat, dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. T. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua. Pendekatan Teknis Sesuai PP No.71/2011. Bandung: Alfabeta.
- Abusyadza.2007. Standar Akuntansi Pemerintah.<http://abusyadza.wordpress.com>. 4 Januari 2023 (19:45)
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Rineka cipta. Jakarta.
- Defitri. 2016. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal*. ISSN: 2541-111x
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi edisi ketiga*. unitpenerbit dan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN. Yogyakarta.
- Kurniawan, I. 2016. Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 13, (1), ISSN print: 1907-3011, ISSN online: 2528-1127.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ningrum, S. A., dan S. Sundari. 2022. Determinasi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.5(1):2622-2205.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta
- Sudiarti, Ni Wayan. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Locus of Control Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung.
- Syarifudin, A .2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen).

- Ucik, A. P., Hafidha., dan D. F. Imam. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan keuangan daerah, Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Wiwik, P. dan Utami, D. L. 2020. Determinan Kualiatas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Governance*. 1(1): 47-56.
- Yendrawati, R. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Faktor Eksternal sebagai Variabel Moderating.
- Zulkarnain dan Ningrum, D. 2020. Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 5(5).s